

# ISLAM DALAM KONTEKS PENGEMBANGAN MASYARAKAT MELAYU NELAYAN BAGIAN PERTAMA: POTRET KONDISI SOSIAL FAKTUAL DESA TAMERAN BENGKALIS RIAU

Arbi Yasin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: [arbi.yasin@uin-suska.ac.id](mailto:arbi.yasin@uin-suska.ac.id)

## Abstrak

Masyarakat nelayan Tameran sebagian besar bersuku Melayu dan mayoritas beragama Islam. Desa Tameran memiliki potensi sumberdaya kelautan yang cukup besar, tetapi masrakatnya masih miskin. Fokus utama penelitian yaitu kajian komprehensif tentang situasi dan kondisi sosial faktual, kependudukan, keberagaman kelompok etnik dan agama, profil pendidikan, sistem ekonomi dan struktur komunitas, organisasi dan kelembagaan sosial serta pengelolaan sumberdaya lokal desa nelayan Tameran. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa desa Tameran memiliki sumberdaya manusia dengan pendidikan formal yang masih rendah. Penduduk Melayu yang berprofesi sebagai nelayan di desa Tameran berjumlah 187 orang, yang terdiri dari: pemilik kapal /pompong 18 orang (9,6 %), pemilik sampan 42 orang (22,5 %), pemilik tambak 3 orang (1,6 %), sebagai buruh nelayan terdapat 80 orang (42,8 %) dan lain-lain/pembantu kerja nelayan 44 orang (23.5 %). Struktur komunitas menunjukkan pola hubungan kental “**Patron-Clie**n” dengan sistem pelapisan masyarakat: kaya-miskin, tokeb(juragan/pemilik)-buruh/pembantu kerja nelayan. Sedangkan keorganisasian dan kelembagaan sosial berhubungan dengan berbagai kebutuhan pokok kehidupan manusia.

**Kata Kunci:** kondisi sosial, program pengembangan, masyarakat nelayan

## Abstract

Temeran's fishing communities are mostly muslims malay. Tameran village has considerable potential of marine resources, but its people are still poor. The main focus of the study is a comprehensive study of the factual situation and social conditions, population, diversity of ethnic and religious groups, educational profile, system and community structure, management and management. The results of this research can be known that the Tameran villager has human resources with a formal education is still low. The Malay population who work as fishermen in the village of Tameran shares 187 people, consisting of: boat owner 18 people (9,6%), cano owner 42 people (22,5%), owner of pond 3 people (1,6%), As a fisherman laborer there are 80 people (42,8%) and others/working assistant of fisherman 44 people (23,5%). The community structure shows the pattern of "Patron-Client" condensed relationship with the coating system of the community: rich-poor, owner, the worker/worker of the fisherman. While organizational and social institutions are associated with the basic needs of human life.

**Keywords:** social conditions, program development, fishing communities

## PENDAHULUAN

Faktor utama yang mendorong dan memicu peneliti ini secara cermat yaitu kondisi objektif masyarakat nelayan yang kebanyakan bersuku bangsa Melayu dan mayoritas beragama Islam. Di sisi lain masih belum bisa terlepas dari masalah kemiskinan, bahkan terkesan kuat berada dalam lingkaran kemiskinan massal (*mass poverty*), yang ditandai dengan taraf hidup rumah tangga nelayan yang bersahaja dan sosial ekonominya yang masih relatif rendah.

Kondisi objektif masyarakat Melayu nelayan seperti itu merupakan modal dasar yang sangat besar artinya dalam penelitian lapangan ini, karena kajian ini bertitiktolak dari sebuah asumsi pemikiran bahwa kondisi nyata masyarakat Melayu bahari merupakan gejala-gejala yang paling vital dalam kajian disiplin ilmu “**Sosiologi Pedesaan**”, terutama sekali bila dikaitkan dengan kehidupan keagamaan dan budaya kerja yang menjadi sentral pembahasan untuk upaya pengembangan masyarakat Melayu laut tersebut.

Agama Islam sebagai suatu agama yang mayoritas dianut oleh orang-orang Melayu di kawasan komunitas pantai, telah sejak lama menganjurkan pengelolaan wilayah bahari dan telah sejak awal atau dini pula memotivasi umat supaya menyadari betul bahwa betapa pentingnya pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan, terutama dalam rangka mengatasi krisis atau kemelut ekonomi, masalah kemiskinan yang berkepanjangan, meningkatkan kesejahteraan umat, pemanfaatan potensi laut dan perikanan serta pemenuhan kebutuhan hidup manusia keseharian.

Curahan perhatian agama Islam tersebut diaktualisasikan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an dengan secara berulang-ulang telah menyinggung masalah laut (*bahr*) berkali-kali. Penyebutan suatu kata tertentu (*bahr*) di dalam Al-Qur'an secara berkali-kali atau berulang-ulang kali berfungsi untuk mengokohkan atau menguatkan (*reinforcement*) suatu pembicaraan atau permasalahan serta menunjukkan pentingnya pembahasan dan permasalahan yang dibicarakan atau yang tersembunyi di balik kata "*bahr*" tersebut, agar mendapat perhatian serius lagi fokus dan menggugah umat atau masyarakat supaya mau menggali dan memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir dan lautan secara maksimal.

Dalam konteks keindonesiaan, permasalahan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan hampir terlupakan dalam kebijaksanaan pembangunan nasional. Crowford (dalam Arbi Yasin, 2008) mengemukakan bahwa perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu masih merupakan hal baru dalam pembangunan di Indonesia. Mengingat hal ini baru tercantum dalam GBHN 1993 dan REPELITA VI. Maka seiring dengan pembangunan wilayah pesisir dan lautan telah dirasakan perlunya desentralisasi dan partisipasi masyarakat. Diharapkan perencanaan lebih dititikberatkan pada bottom up planning atau proses dari bawah yang dikombinasikan dengan top down planning atau perencanaan dari atas ke bawah.

Berdasarkan pada kenyataan dan hasil-hasil studi serta pengalaman-pengalaman peneliti selama ini bahwa pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan masih membutuhkan keikutsertaan seluruh tingkat pemerintahan. Pemerintah dae-

rah setempat perlu diikutsertakan karena mereka mengelola tempat di mana pembangunan dilaksanakan, sumberdaya ditemukan dan keuntungan atau bahkan hukum sebagian besar dijatuhkan. Pemerintah pusat harus terlibat sebab pertanggungjawaban dan kekuasaan untuk masalah kelautan sudah pasti ada di situ (navigasi, keamanan nasional, migrasi ikan, hubungan internasional dan lain-lain). Pemerintah tingkat propinsi harus diikutsertakan karena seluruh pihak-pihak yang bertanggung-jawab di wilayah pesisir mempunyai suatu peran dalam proses pengelolaan wilayah pesisir dan lautan.

Selama ini dirasakan kurangnya kepedulian, tanggungjawab dan perhatian pemerintah terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan, terutama perhatian serius lagi khusus terhadap nasib atau kehidupan masyarakat pantai atau penjaga laut tersebut.

Sugeng Budiharsono (2001) mengatakan dengan tegas bahwa penyebab utama rendahnya kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan adalah: (1) Pemerintah dan masyarakat masih mengutamakan eksploitasi daratan, (2) Teknologi eksplorasi dan eksploitasi lautan, khususnya untuk penambangan minyak dan gas bumi serta mineral lainnya memerlukan teknologi tinggi dan biaya mahal, (3) Kualitas sumberdaya manusia yang terlibat dalam sektor kelautan relatif masih rendah, khususnya perikanan tangkap, (4) Introduksi teknologi baru dalam perikanan tangkap tidak terjangkau oleh nelayan yang kondisi sosial ekonominya rendah, (5) Sistem kelembagaan yang ada belum mendukung pada sektor kelautan.

Kenyataan rendahnya pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan juga dirasakan di seluruh komunitas pantai Kabupaten Bengkalis Riau. Banyak kawasan di Kabupaten ini yang wilayah pesisir dan lautannya belum mendapat sentuhan pembangunan secara optimal, desa Tameran merupakan salah satu desa yang dimaksudkan.

Padahal desa Tameran mengandung potensi kelautan yang cukup besar dan menjanjikan. Beraneka ragam ikan, kepiting (ketam) dan ranjungan. Jenis rumput-rumputan laut yang dapat dimanfaatkan untuk kosmetik maupun obat-obatan. Di samping potensi lahan untuk budidaya ikan keramba, kepiting, kerang-kerangan, kerapu, dan udang. Komoditi perikanan yang dikembangkan saat ini adalah ikan keramba dan

udang windu. Kondisi geografis yang menguntungkan ini dimanfaatkan sebagian besar masyarakat desa Tameran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bermata pencaharian sebagai nelayan.

Namun demikian, pengelolaan sumberdaya pesisir pantai dan laut tersebut ternyata belum cukup memadai untuk mengantarkan masyarakat nelayan desa Tameran mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik, karena ternyata di lapangan diperoleh fakta bahwa sebagian masyarakat Melayu nelayan desa Tameran kondisi kehidupannya masih banyak yang miskin. Gambaran kemiskinan ini tampak jelas terutama dari kondisi rumah, fasilitas umum dan sarana penunjang kehidupan lainnya.

Oleh karena itu, golongan masyarakat Melayu nelayan yang ada di desa Tameran tersebut, sudah sepantasnya mendapat perhatian dalam pengembangan masyarakat desa pantai dewasa ini, karena golongan itulah yang berperan dalam menyediakan bahan pangan yang berprotein tinggi dan murah bagi masyarakat luas atau khalayak ramai.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Melayu nelayan desa Tameran Kabupaten Bengkalis Riau antara lain: 1). Meski sumberdaya kelautan tersedia, namun tingkat kesejahteraan sosial ekonomi mereka masih tetap rendah. 2). Akses terhadap sumberdaya relatif masih terbatas, misalnya, usaha penangkapan dilakukan terbatas pada perairan yang sempit dengan potensi yang terbatas yaitu pada perairan pantai. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana penangkapan ikan. 3). Struktur modal dan akses terhadap pasar yang masih lemah. 4). Pendapatan yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga nelayan. 5). Mayoritas masyarakat Melayu nelayan desa Tameran beragama Islam, agama Islam telah banyak memberikan kontribusi untuk mengatasi kemiskinan dan untuk pengembangan masyarakat nelayan, namun masyarakat Melayu nelayan desa Tameran tetap berada di bawah garis kemiskinan atau memprihatinkan.

Dengan memahami persoalan-persoalan kemiskinan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan sentral penelitian yang disederhanakan untuk bagian yang pertama ini, yaitu: bagaimana kondisi sosial faktual masyarakat Melayu nelayandes Tameran Bengkalis Riau?

### ***Tujuan Khusus dan Manfaat Penelitian***

Sesuai dengan pertanyaan sentral penelitian yang disederhanakan untuk bagian pertama yang terdapat di atas, maka dapat dirumuskan ***tujuan khusus*** penelitian ini, sebagai berikut: untuk memberikan gambaran komprehensif situasi sosial masyarakat Melayu nelayan desa Tameran Bengkalis Riau, terutama mengkaji: lokasi desa Tameran, kependudukan, keberagaman kelompok etnik dan agama, profil pendidikan, sistem ekonomi dan struktur komunitas, organisasi dan kelembagaan sosial, serta pengelolaan sumberdaya lokal.

Adapun ***manfaat penelitian*** ini adalah dapat membantu Pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya melalui dinas terkait yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk mengimplikasikan kebijakan yang diperlukan dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan masyarakat Melayu nelayan desa Tameran.

Bermanfaat pula membantu masyarakat Melayu nelayan desa Tameran untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, kemelut ekonomi dan kemelut rumahtangga sendiri dengan cara menerapkan strategi pengembangan agribisnis perikanan yang baru, yang diarahkan untuk menumbuhkan-potensi-potensi sumberdaya alam dan lingkungan setempat dengan optimal dan seefisien mungkin serta bersifat islami.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***Program Pengembangan Masyarakat Nelayan Menurut Perspektif Islam***

Dalam keputusan ilmu-ilmu sosial, masyarakat nelayan termasuk dalam konsep "*peasant*". Memang ada juga peneliti yang mengartikan *peasant* terbatas dalam mata pencaharian yang khas. Misalnya, Wolf mendefinisikan Peasant sebagai petani yang hidup dari mengolah tanah dan tinggal di pedesaan (Wolf, 1982). Kalau definisi ini dijadikan acuan maka nelayan, buruh, pengrajin tidak masuk dalam konsep peasant.

Agar masyarakat nelayan mencakup dalam konsep peasant, konteks pengertiannya lebih cocok dikaitkan dengan kelompok orang desa dengan ciri-ciri sosial kultural, ekonomi yang khas. Firth mengartikan peasant mengacu kepada seluruh masyarakat pedesaan beserta sistem ekonominya. Meskipun mata pencaharian hidup utama petani peasant menggarap tanah, namun

kategori pekerjaan petani tersebut, hanya dipisahkan secara teoritis.

Di Kampung Perupak Kelantan Malaysia, Firth melihat bahwa penduduk desa yang bekerja sebagai petani sawah juga bekerja sebagai nelayan. Mereka semua hidup dalam sebuah desa dimana anggotanya tidak hanya saling terlibat dalam hubungan kerabat dan keagamaan tetapi juga dalam bidang ekonomi. Kehidupan pedesaan dimana berbagai kegiatan penduduk saling terkait dan khas disebut "peasantry". Seorang penduduk desa apakah petani, perajin, nelayan akan disebut sebagai peasant (Firth dalam Marjali 1993).

Dari keterangan di atas terlihat perbedaan titik pandang antara Wolf dan Firth. Berbicara tentang peasant, bagi Firth adalah sistem ekonomi yang khas, sedangkan bagi Wolf mengacu kepada jenis matapencaharian.

Masyarakat nelayan yang hidup dari hasil menangkap ikan dan bermukim di sepanjang pantai mempunyai dinamika sosial yang khas sesuai dengan lingkungannya (local specific). Tidak berbeda dengan masyarakat desa agraris, masyarakat nelayan memiliki paham keagamaan tradisional dan "**fanatik**" beragama.

Sudirman M. Johan (1996) menyimpulkan penelitian lapangannya bahwa faktor utama penyebab kemiskinan masyarakat maritim adalah faktor budaya yang berakar pada ajaran kepercayaan tradisional. Dalam sistem kepercayaan tradisional ini terdapat suatu faham yang bersifat "**fatalisme**" yang menyerahkan semua persoalan hidup kepada kehendak mutlak Tuhan. Manusia tidak punya peran untuk mengubah serta meningkatkan taraf hidupnya. Semuanya itu telah ditentukan Tuhan semenjak permulaan kehidupan manusia. Manusia bersifat statis, tidak terdapat inisiatif untuk berusaha keras mengubah nasib ke arah yang lebih baik, manusia hanya menjalankan garis hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Masyarakat pasrah dengan keadaan yang melingkarinya, tidak punya visi dan misi ekonomi ke masa depan, keadaan kemiskinan yang mereka alami kurang disadarinya dan bahkan tidak merasa sebagai beban yang harus dientaskan.

Oleh karenanya, program-program pengembangan masyarakat pedesaan nelayan akan lebih mencapai hasil dan sasaran yang cepat lagi tepat guna harus memperhatikan bentuk-bentuk pemahaman ajaran agama pada masyarakat nelayan

itu. Dengan demikian, manfaat program pengembangan masyarakat maritim dapat merata ke seluruh lapisan, bukan hanya bermanfaat dan menyentuh pada lapisan atas, sedangkan lapisan bawah mengalami pemiskinan dan tertekan secara ekonomis berkepanjangan.

Problematika kemiskinan yang melanda masyarakat nelayan yang telah berlangsung relatif lama, teridentifikasi dalam Al-Qur'an pada surah Al-Kahf (18) ayat 79, yang artinya: "**Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut** " (Agus Hidayatullah, Dkk, 2013).

Ayat Al-Qur'an ini mengisyaratkan bahwa masyarakat pengelola laut atau disebut sebagai masyarakat nelayan identik dengan kesan keadaan klasik memprihatinkan, yang kerap kali secara riil memang kebanyakan mereka penjaga pantai tersebut hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu orang-orang yang lemah secara ekonomis, orang-orang yang sangat membutuhkan perahu tradisional dan orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan (perikanan).

Keadaan masyarakat pesisir tradisional secara umum memprihatinkan. Sebagian besar masyarakat laut tersebut masih merupakan nelayan tradisional dengan karakteristik sosial budaya yang memang belum begitu kondusif untuk suatu kemajuan dan perkembangan, terkesan bersahaja. Standar kehidupan mereka secara ekonomis relatif rendah dan masih jauh dari kesejahteraan.

Arbi Yasin (2004) mengungkapkan bahwa kesenjangan ekonomi yang timbul dalam masyarakat nelayan disebabkan oleh program-program pengembangan masyarakat nelayan yang tidak dengan sendirinya menimbulkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat pantai itu sendiri.

Sedangkan tujuan program pengembangan masyarakat menurut Soemarwoto (1991) adalah untuk meningkatkan tingkat hidup dan kesejahteraan masyarakat atau menaikkan mutu hidup rakyat dimana mutu hidup mempunyai arti derajat terpenuhinya kebutuhan dasar yang menjadi kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan tersebut meliputi pangan, air bersih, pendidikan dan perumahan.

Untuk mengatasi problematika kemiskinan yang melanda masyarakat pengelola sumberdaya pesisir dan lautan, diperlukan upaya jitu dan

solusi serius dengan mengikuti petunjuk dan bimbingan Allah SWT dalam Al-Qur'an, yang salah satunya adalah dengan cara pemberian bantuan secara benar.

Kajian pemberian bantuan secara islami ini difokuskan kepada informasi yang dapat digali dari Surah Al Ma'idah (5) ayat 2, yang artinya: **"Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan"** (Agus Hidayatullah, Dkk, 2013).

Majelis Malin Sutan (2014) dalam bulletin Ad-Dakwahnya mengatakan bahwa sudah menjadi fitrah manusia untuk hidup bermasyarakat, bergaul dengan sesamanya, karena mereka saling membutuhkan satu sama lain, diantaranya: saling tolong menolong (kerjasama) dalam kebajikan, saling mengunjungi, saling berkasih sayang atas dasar cinta karena Allah, saling nasehat menasehati dengan kebenaran dan sabar, membangun sarana kehidupan serta manusia membutuhkan keamanan dan ketentraman.

Ayat Al-Qur'an di atas menginformasikan bahwa betapa pentingnya kerjasama dan pemberian bantuan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Melihat kehidupan masyarakat nelayan yang secara umum memang belum menggembirakan, bahkan masih jauh di bawah garis kemiskinan, maka berdasarkan kenyataan tersebut berarti mereka memerlukan dukungan materiil melalui bantuan atau kerjasama, yang memungkinkan pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat pantai atau pesisir dari level bawah.

Ahmad Yusam Thobroni (2005) telah menjelaskan bahwa bantuan dan kerjasama sungguh telah banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, baik organisasi sosial maupun keagamaan, bahkan secara individual. Akan tetapi tentu saja hal ini belum memadai terutama jika bantuan dan kerjasama tersebut tidak disusun secara terencana dan terkoordinasi dengan baik. Lebih-lebih lagi jika pelaksanaannya ditumpangi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi.

Selanjutnya Ahmad Yusam Thobroni (2013) memberikan suatu ilustrasi bahwa masyarakat pesisir dan pulau-pulau masih memerlukan pendidikan dasar dan menengah yang baik. Demikian pula modal kerja bagi para nelayan, di

samping ketrampilan pengolahan laut. Tentu tidak ada salahnya kalau program yang dilakukan terhadap masyarakat daratan diperlakukan pula terhadap masyarakat pesisir. Misalnya dengan sistem orang tua angkat (orangtua asuh), terutama dari kalangan masyarakat muslim secara terorganisir.

Dengan demikian, betapa berperannya pemberian bantuan yang tepat sasaran dalam rangka menunjang program pengembangan masyarakat nelayan yang sering dilanda bencana dan memiliki problema kehidupan serta kemiskinan.

### ***Pendekatan Partisipatif Pembangunan Masyarakat***

Nelayan

Pembangunan bukanlah suatu proses linier, melainkan suatu kompleksitas yang terbentuk dan perubahan-perubahan yang saling terkait erat. Pendekatan dari "atas ke bawah" (*top-down*) dalam proses pembangunan telah diketahui banyak kelemahannya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada. Sebagai reaksi atas kegagalan paradigma pembangunan yang sentralistis, ditawarkan pendekatan dari "bawah ke atas" (*bottom-up*) atau "pendekatan akar rumput" (*grass roots approaches*). Pendekatan ini telah banyak menarik perhatian berbagai kalangan. Penekanan pendekatan dari "bawah ke atas" (*bottom-up*) adalah keterlibatan penuh masyarakat lokal dalam pembangunan. Dengan pendekatan dari "bawah ke atas" (*bottom-up*), maka prinsip-prinsip partisipasi menjadi ide sentral dalam proses pembangunan secara keseluruhan.

Prinsip dasar dari pendekatan partisipatif menurut Dams (1980), adalah pengembangan masyarakat melalui sistem dan kelembagaan yang menjamin hak asasi kehidupan manusia, dan keputusan politik yang mendukung kelompok masyarakat yang kurang beruntung dalam pembangunan sosial ekonomi, serta untuk meningkatkan organisasi dan peran masyarakat. Menurut Suharjo (1986) dalam menentukan program pembangunan pengembangan masyarakat dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu: (1) program pembangunan ditentukan oleh pihak luar (pemerintah), (2) program pembangunan ditetapkan oleh masyarakat sendiri, dan (3) program pembangunan yang ditetapkan bersama oleh masyarakat dan pemerintah.

**Program pembangunan yang ditentukan oleh pihak luar (pemerintah)**, didasarkan atas perhitungan bahwa program tersebut diperlukan oleh masyarakat, tanpa melalui konsultasi atau pertemuan formal terlebih dahulu dengan masyarakat setempat, baik dengan seluruh anggota masyarakat ataupun melalui pimpinan atau wakil-wakil mereka. Program semacam ini bercirikan instruktif, dan dimaksudkan untuk kecepatan bertindak, efisien dari segi waktu dan energi, menyelesaikan masalah dengan segera, dan menghasilkan manfaat yang besar (Slamet, 1994).

Resiko dari cara ini adalah bahwa masyarakat tidak dipersiapkan dari awal untuk berpartisipasi terhadap program tersebut, sehingga ada kemungkinan masyarakat sulit diajak berpartisipasi dalam tahap pelaksanaannya, bahkan pada pemanfaatannya, padahal partisipasi masyarakat merupakan faktor esensial dalam proses pembangunan.

**Program pembangunan yang ditetapkan oleh masyarakat sendiri**, bertitiktolak dari rangsangan bahwa jika penentuan program diserahkan kepada masyarakat itu sendiri, maka mereka akan mempunyai motivasi yang kuat untuk melaksanakan program tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan hal-hal yang ingin mereka capai dalam program tersebut adalah yang mereka rasakan sebagai kebutuhan yang memungkinkan berdasarkan pengalaman mereka sendiri.

**Program pembangunan yang ditetapkan bersama**, pendekatan ini merupakan gabungan antara kedua pendekatan tersebut, dimaksudkan untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada kedua pendekatan itu. Dalam pelaksanaannya pihak luar mengadakan konsultasi dengan masyarakat, mendiskusikan pendapat tentang situasi lingkungan serta kehidupan masyarakat setempat, kemudian memutuskan bersama program yang menjadi kesepakatan.

Dalam konteks pembangunan nasional, idealnya pendekatan pembangunan dari bawah dan dari atas dipadu secara harmonis, dan keduanya saling melengkapi dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat (Nasoetion, 1990). Pemerintah dianggap memiliki berbagai kemampuan seperti teknologi, keahlian, biaya, kekuasaan, dan administrasi. Melalui kemampuannya itu pemerintah dapat memainkan peranan penting seba-

gai fasilitator dan dinamisator dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.

Pendekatan otoriter dalam penanganan masalah sosial dalam pembangunan, berakibat masalah sosial yang dlitangani dalam pembangunan bukan merupakan masalah komunitas (masyarakat). Akibatnya masyarakat terkondisikan menjadi kurang menyadari dan kurang peduli terhadap masalah riil yang ada dilingkungan mereka, sehingga menjadi kurang mampu memanfaatkan potensi dan peluang serta sumberdaya yang ada untuk menangani masalah sosial dari dan oleh masyarakat. Secara struktural masyarakat berada pada situasi tidak memperoleh kesempatan secara leluasa mewujudkan aspirasinya untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menjadi tidak berdaya, atau bahkan tergantung pada intervensi penguasa.

Paling tidak ada enam komponen penting yang saling terkait dalam proses pembangunan perikanan, yaitu: (1) perluasan usaha perikanan untuk meningkatkan produksi, (2) peningkatan produksi persatuan usaha perikanan, (3) peningkatan produksi perikanan menjadi bagian dari ekonomi nasional, (4) peningkatan nilai produksi perikanan pertenaga kerja, (5) peningkatan pendapatan pertenaga kerja, dan (6) tercapainya transformasi perikanan (Mosher, 1971).

Kesemuanya itu bermuara pada satu arah tujuan, yaitu tercapainya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan, sebagai pelaku utama pembangunan di sektor perikanan. Conyers (1991) membagi kebutuhan dasar ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) bahan-bahan konsumsi pokok tertentu seperti pangan, sandang, papan, (2) pelayanan pokok seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan (3) hak untuk berpartisipasi dalam membuat dan melaksanakan program yang berpengaruh terhadap pengembangan pribadi.

### **Ukuran Kemiskinan Untuk Pengembangan**

#### **Masyarakat Nelayan**

Secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat kehidupan yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Ishaq, 2002). Standar kehidupan

yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, moral dan harga diri mereka.

Kemiskinan dapat merupakan kemiskinan absolut ataupun kemiskinan relatif. Kemiskinan dapat pula diartikan secara sempit ataupun secara luas. Kendati demikian semua sepakat bahwa kemiskinan merupakan kondisi yang tidak memuaskan ataupun kondisi yang tidak diinginkan. Para peneliti mungkin bertolak dari indikator lokal sesuai dengan pemahaman/persepsi masyarakat setempat atau masyarakat lokal, dimana masyarakat lokal memahami betul apa arti kemiskinan di kalangan mereka. Seperti pada masyarakat petani Jawa terdapat istilah "cukupan" yang mengandung arti sebagai terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang secara wajar diperlukan oleh petani secara biasa atau umum (Singarimbun dan Penny dalam Rusli, Dkk, 1995).

Identifikasi atau pengenalan gejala kemiskinan dilakukan dengan menggunakan metodologi tertentu. Beberapa metodologi yang ada memfokuskan penelaahan antara lain pada aspek: (1) identifikasi golongan/kelompok masyarakat miskin, untuk menjawab siapa?, dan (2) identifikasi daerah miskin, untuk mengetahui dimana? Pendekatan analisis yang dilakukan atas kedua hal tersebut berbeda. Mengidentifikasi golongan miskin lebih ditekankan pada satuan analisis perorangan atau perkapita dan lebih lanjut pada identitas atau karakteristik golongan sasaran. Sedangkan identifikasi daerah miskin lebih ditekankan pada satuan analisis wilayah dan lebih lanjut pada identifikasi karakteristik wilayah.

Untuk mengetahui berapa banyak penduduk yang tergolong miskin umumnya dilakukan dengan penetapan suatu garis kemiskinan (poverty line). Pengukuran kemiskinan secara absolut dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain dengan konsep garis kemiskinan Sayogyo, konsep garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS dan konsep garis kemiskinan menurut Dirjen Bangdes.

### **KONDISI SOSIAL FAKTUAL MASYARAKAT MELAYU NELAYAN DESA TAMERAN**

Sesuai dengan kenyataan dan beberapa temuan yang didapat di lapangan penelitian pada

masyarakat Melayu nelayan desa Tameran, maka di bawah ini dengan sengaja disajikan data hasil penelitian untuk memberikan gambaran komprehensif situasi sosial masyarakat Melayu nelayan desa Tameran Bengkalis Riau itu, terutama sekali mengkaji: lokasi dan kependudukan, keberagaman kelompok etnik dan agama, profil pendidikan, sistem ekonomi dan struktur komunitas, organisasi dan kelembagaan sosial, serta pengelolaan sumberdaya lokal.

#### ***Setting Lokasi dan Kependudukan***

Desa Tameran terletak di sebelah Timur Ibukota Kecamatan Bengkalis yang merupakan salah satu desapantai yang potensial penghasil ikan. Desa Tameran Bengkalis Riau berbatasan dengan desa-desa sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan desa Belas Kecamatan Bantan, sebelah timur berbatasan dengan desa Penebal Kecamatan Bengkalis, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bengkalis, dan sebelah barat berbatasan dengan desa Damai Kecamatan Bengkalis serta memiliki ratio beban tanggungan hidup yang cukup tinggi yaitu sekitar (42,09 %)

#### ***Keberagaman Kelompok Etnik dan Agama***

Desa Tameran Bengkalis Riau didiami oleh beragam kelompok etnik. Empat kelompok etnik utama adalah Melayu, Jawa, Suku Asli dan etnik Cina. Di samping itu terdapat kelompok etnik lain seperti Bugis, Minang dan etnik Batak. Jumlah komposisi penduduk berdasarkan kelompok etnik dapat diutarakan sebagai berikut: kelompok etnik Melayu di desa Tameran merupakan kelompok etnik terbesar jumlahnya yaitu sebesar (62,8 %), diikuti oleh kelompok etnik Jawa (20,5 %), kelompok suku Asli (10 %), kelompok etnik Cina/Tionghoa (3,9 %) dan kelompok etnik lain-lainnya yang terdiri dari kelompok etnik Bugis, Minang dan etnik Batak, sekitar (2,8 %).

Sedangkan pada pembahasan tentang keberagaman kelompok agama, akan dijelaskan mengenai kondisi-kondisi kelompok agama yang dianut oleh penduduk atau masyarakat desa Tameran. Keadaan-keadaan agama yang diyakini, dianut atau menjadi pegangan penduduk di tengah-tengah perkembangan dan kemajuan sosial desa Tameran adalah: kelompok agama Islam yang merupakan porsi kelompok yang

terbesar (85 %) dianut, kemudian diikuti kelompok agama Budha (13,9 %), Kristen (0,5 %), sedangkan sisanya beragama Konghucu atau yang memenuhi kategori lain-lain sekitar (0,8 %).

### **Profil Pendidikan**

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia pembangunan. Kartasasmita (1996:140), menunjukkan bukti bahwa keberhasilan negara-negara industri baru terjadi karena penekanan yang diberikan pada bidang pendidikan untuk pengembangan kualitas sumberdaya manusia pada umumnya.

Konsep Gary Becker (dalam Kartasasmita, 1996:140), tentang modal manusia (human capital) menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi diperoleh dari peningkatan sumberdaya manusia, di samping perubahan teknologi, dan bahkan menurut Gillery dan Eggland (1989: 4) mengatakan bahwa sumberdaya manusia lebih penting daripada dua sumberdaya lainnya yaitu sumberdaya yang bersifat fisik dan sumberdaya finansial.

Investasi dalam "human capital" yakni dalam pendidikan, pelatihan dan kesehatan, berdasarkan berbagai penelitian menunjukkan telah menghasilkan sumberdaya pertumbuhan yang tidak kalah pentingnya dengan investasi pada modal fisik. "*Human Capital*" merupakan asset utama pembangunan dan perwujudannya digambarkan oleh pengetahuan, keterampilan dan motivasi warga masyarakat (Scoot dan Jaffe, 1994: 13).

Melalui kajian ini ditemukan bahwa sumberdaya manusia nelayan, umumnya hanya berpendidikan formal tingkat Sekolah Dasar dan pendidikan nonformalnya sangat terbatas. Dari data konkrit para nelayan yang diamati dalam penelitian ini, sebagian besar (63,1%) dari mereka berpendidikan formal Sekolah Dasar, (22,4%) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan (14,4%) Sekolah Lanjutan Atas. Pendidikan non formal, sebagian besar (80,7%) tidak pernah mendapatkan/mengikuti pendidikan non formal (11,7%) pernah mengikuti pelatihan, dan (7,4%) pernah mengikuti pelatihan dan magang tentang usaha perikanan.

Kondisi tersebut menunjukkan sangat diperlukannya upaya peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia nelayan melalui pendidikan

dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang relevan tentang berbagai aspek penting dalam pembangunan perikanan yang meliputi aspek-aspek; teknologi, budidaya usaha nelayan, manajemen usaha nelayan, pemasaran hasil perikanan serta tantangan dan peluang dalam pembangunan perikanan. Pendidikan dan pelatihan yang dirancang dalam bentuk pelatihan-pelatihan singkat, kursus dan magang memiliki makna strategis dalam pengembangan wawasan pengetahuan dan pemahaman nelayan akan berbagai informasi dan inovasi pembangunan perikanan.

### **Sistem Ekonomi dan Struktur Komunitas**

#### **Sistem Ekonomi**

Pada umumnya penduduk desa Tameran mempunyai matapecaharian sebagai petani (63,41 %), nelayan (16,89 %), peternak (1,44%), pengrajin (5,78%), PNS lainya (0,7%), guru (2,89 %), pedagang (1,35 %), buruh (4,60 %) dan sebahagian kecil tukang sekitar (2,89 %).

Penduduk atau masyarakat nelayan di desa Tameran Kecamatan Bengkalis terdiri dari dua golongan yakni (1) nelayan tetap, dan (2) nelayan sambilan. Data jumlah dari golongan nelayan tetap dan sambilan dapat dikemukakan bahwa persentase golongan "*nelayan tetap*" mengalami pertambahan dan "*nelayan sambilan*" mengalami penurunan. Jumlah nelayan tetap tersebut terus bertambah setiap tahunnya disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk usia produktif di desa Tameran.

#### **Sistem Upah Nelayan**

Sistem upah pada usaha perikanan laut di desa Tameran ada dua macam. *Pertama*, sistem upah tetap dengan gaji harian sebesar Rp.100.000 sampai dengan Rp.200.000 per hari. Satu kali operasi penangkapan selama 12 hari, yakni pada pasang besar yang disebut "*Satu Kelam*". Jika penghasilan melebihi Rp.35.000.000 untuk satu trip diberikan premi sebesar Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.1.500.000 per orang. Gaji serta premi yang diterima itu merupakan hasil bersih yang dibawa pulang oleh buruh nelayan karena makan, minum dan rokok sudah disediakan oleh tokeh (pemilik kapal) selama operasi penangkapan dilaut berlangsung.



Penerimaan gaji itu tidak dilakukan setiap akhir bulan, seorang buruh nelayan dapat meminjam dari tokeh sesuai dengan kebutuhan rumahtangganya. Jika kebutuhan mendesak penerimaan pinjaman dapat jauh lebih besar dari gaji yang bakal diterimanya untuk beberapa bulan mendatang. Bagi buruh nelayan pinjaman ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti perbaikan rumah, biaya sekolah anak dan lain-lain. Di lain pihak, pinjaman ini merupakan keuntungan besar bagi seorang tokeh karena buruh nelayan tersebut tidak mungkin dapat pindah bekerja pada tokeh yang lain.

Sistem upah jenis *kedua* merupakan bagi hasil di mana pemilik kapal mendapat bagian 50 persen dari hasil penjualan bersih. Sisa hasil penjualan dibagi sama rata sesama buruh nelayan lainnya. Kerusakan kapal serta alat penangkapan ditanggung pemilik. Berdasarkan Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan tahun 1964 dalam hal penangkapan ikan dengan kapal bermotor berlaku bagi hasil dengan perbandingan 60 persen untuk pemilik dan 40 persen untuk penggarap (HNSI, 1980:79).

Dengan demikian sistem bagi hasil penangkapan ikan di desa Tameran Kecamatan Bengkalis merugikan pemilik kapal sebesar 10 persen. Walaupun demikian para tokeh tetap mau begitu dan dalam kenyataannya pihak nelayan pemilik/tokeh masih berada pada pihak yang beruntung karena hasil *"dijual"* pada pemilik/tokeh itu sendiri, yang juga melakukan pengolahan hasil tangkap tersebut.

Armada penangkapan ikan yang terdapat di desa Tameran terdiri dari: (1) kapal motor/pompong (9,6 %), (2) perahu/sampan (22,5 %), yang juga berfungsi sebagai sarana pengangkutan orang, barang dan hasil bumi, (3) pemilik tambak (1,6 %), (4) buruh nelayan (42,8 %) dan lain-lain (pembantu kerja nelayan) sekitar (23,5 %).

### Struktur Komunitas

*Struktur komunitas* dan stratifikasi sosial, akan mempengaruhi pola hubungan masyarakat dalam kehidupan bersama, termasuk dalam kegiatan pembangunan. Pola hubungan *'patron-client'* di masyarakat Melayu nelayan desa Tameran akan menentukan corak partisipasi yang berbeda antara keduanya. Sistem pelapisan masyarakat menyebabkan adanya pengelom-

pokan tertentu atas individu-individu dalam masyarakat, seperti: kaya-miskin, tokeh/juragan-buruh nelayan, terpelajar-awam, pemimpin-pengikut. Stratifikasi sosial seperti ini memberi corak pada perilaku partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Struktur masyarakat Melayu nelayan desa Tameran Kecamatan Bengkalis berdasarkan status dalam usaha perikanan laut melibatkan di satu pihak nelayan yang mempunyai status pemilik (juragan). Nelayan pemilik (juragan) terbagi atas nelayan tradisional yang tidak menggunakan perahu atau hanya menggunakan perahu tanpa motor (PTM) dan nelayan non tradisional, yaitu nelayan pemilik yang dalam melakukan usaha penangkapan ikan menggunakan armada kapal motor (K.M). Golongan nelayan non-tradisional masih dapat dibedakan atas dua lapisan yaitu: nelayan non-tradisional yang telah berhasil dalam usaha secara mandiri dan nelayan non-tradisional yang memperoleh status baru itu berkat fasilitas kredit dari pemerintah.

### Organisasi dan Kelembagaan Sosial

Kelembagaan sosial pada dasarnya menyangkut seperangkat norma atau tata kelakuan. Kelembagaan sosial merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok didalam kehidupan masyarakat, wujud konkrit kelembagaan sosial tersebut adalah asosiasi.

Batasan kelembagaan sosial yang dikemukakan oleh Bertrand (1974) yang dikutip oleh Kolopaking dan Tonny (2002), bahwa kelembagaan sosial adalah tata abstraksi yang lebih tinggi dari grup, organisasi dan sistem sosial lainnya. Bahkan Broom dan Zelznick (1956) yang dikutip oleh Kolopaking dan Tonny (2002) mengatakan, jika suatu asosiasi melayani kepentingan umum dan bukan hanya kepentingan pribadi, dilakukan secara teratur, tetap dan diterima oleh umum, maka dapat disebut suatu institution.

Jadi kelembagaan dan asosiasi adalah sama, hanya yang pertama (kelembagaan) melayani kepentingan umum dan yang kedua (asosiasi) melayani kepentingan khusus. Namun keduanya merupakan bentuk-bentuk organisasi sosial dan organisasi sosial disamakan dengan struktur. Olehkarena itu struktur diartikan lebih luas.

Sebaliknya organisasi adalah struktur khusus yang dibentuk dan disusun dengan sengaja untuk kelompok-kelompok tertentu.

Konsisten dengan itu, maka fungsi kelembagaan sosial menurut Van Doom dan Lammers (1959) adalah: (1) memberi pedoman berperilaku pada individu/masyarakat, bagaimana mereka bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama dalam menyangkut kebutuhan-kebutuhan, (2) menjaga keutuhan, dengan adanya pedoman yang diterima bersama, maka kesatuan dalam masyarakat dapat dipelihara, (3) memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan kontrol sosial (*Social control*), artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya dan (4) memenuhi kebutuhan pokok manusia atau masyarakat (Kolopaking dan Tonny, 2002).

Kelembagaan ini bisa *formal* seperti: koperasi, perbankan, balai penyuluhan, pos kesehatan dan bisa *informal* seperti kelompok pengajian dan kelompok-kelompok nelayan lainnya. Kelembagaan lokal (kelompok lokal) merupakan tempat masuknya inovasi pembangunan yang datang dari luar dan oleh karenanya dapat mempercepat jalannya proses difusi inovasi di kalangan masyarakat nelayan.

Kelembagaan lokal dapat menghubungkan masyarakat dengan birokrasi pemerintah. Kelembagaan lokal juga dapat untuk memobilisasi sumberdaya, mengorganisasikan pelaksanaan pembangunan dan dapat pula merupakan wahana yang efektif untuk meningkatkan pengembangan usaha nelayan serta pengelolaan keuangan rumahtangga nelayan, karena sudah dikenal sejak lama berfungsi sebagai wahana komunikasi yang akrab bagi warga masyarakat setempat (Nasution, 1991:16).

Di dalam perkembangan selanjutnya, norma-norma tersebut dapat dikategorikan ke dalam berbagai kebutuhan pokok kehidupan manusia misalnya, untuk kebutuhan matapencaharian menimbulkan kelembagaan perikanan, seperti pada masyarakat nelayan desa Tameran terdapatnya koperasi yang melayani kebutuhan nelayan serta hubungan nelayan dengan para tokeh.

Kelembagaan sosial budaya yang ada di desa Tameran antara lain, Badan Perwakilan Desa (BPD), PKK, Organisasi Kepemudaan, Remaja

Masjid dan Persatuan Kematian. Lembaga yang disebut di atas merupakan lembaga masyarakat desa yang merupakan wahana pengembangan masyarakat dalam pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan di desa Tameran Bengkalis Riau.

### ***Pengelolaan Sumberdaya Lokal***

Dahulu nenek moyang kita menangkap ikan hanya untuk kebutuhan keseharian (makan). Ikan yang ditangkap digunakan untuk memberi makan keluarga dan sebagian dijual, sehingga bisa mendapatkan uang serta dapat membeli sesuatu untuk kebutuhan hidup.

Peningkatan jumlah penduduk desa Tameran dan desa lain telah berakibat menurunnya sumberdaya, padahal ikan tidak dapat berproduksi secara cepat, dan banyaknya *mangrove* yang telah ditebang untuk keperluan perumahan, kayu bakar pabrik batu bata dan kayu bakar untuk kebutuhan rumah tangga.

Hal ini memperlihatkan bahwa salah satu masalah besar yang dihadapi adalah menyeimbangkan jumlah orang di desa Tameran dengan sumberdaya agar dapat menghidupi diri untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Kelangsungan hidup praktek pengelolaan sumberdaya laut tradisional dihadapkan pada persoalan semakin terbatasnya akses sumberdaya perikanan laut. Keterbatasan akses sumberdaya tersebut pada satu sisi disebabkan telah beroperasinya kapal-kapal besar yang mempergunakan alat-alat tangkap yang menguras sumberdaya (*over exploitation*) yang memasuki wilayah tangkapan tradisional dan pada sisi yang lain adanya sifat sumberdaya perikanan yang dianggap tidak bertuan (*open acces*). Setiap orang atau kelompok dapat berkesempatan untuk memanfaatkan sumberdaya itu, akhirnya sumberdaya tersebut semakin terkuras, cepat habis dan tidak jelas keberlangsungan pemanfaatannya.

Sumberdaya umum adalah sumberdaya yang tidak dimiliki atau diawasi secara eksklusif oleh satu orang pemilik atau satu grup pemilik, oleh karena itu pihak-pihak yang terlibat dalam pemanfaatannya tidak memiliki kendali dan tanggungjawab yang jelas terhadap kualitas dan prospek sumberdaya tersebut, sehingga tidak memiliki insentif untuk membuat keputusan investasi dan alokasi sumberdaya yang efisien. Karena sumberdaya bersama ini tidak dikuasai

oleh perorangan atau agen ekonomi tertentu, maka akses terhadapnya tidak dibatasi, pula, sehingga mendorong terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan.

Beberapa tahun lalu, kebanyakan nelayan telah menggunakan jaring kurau dan jaring batu untuk penangkapan ikan. **“Jaring kurau”** yaitu alat tangkap yang bisa menangkap semua jenis ikan, ikan kecil sampai besar, yang mempunahkan benih-benih ikan yang ada. **“Jaring batu”** adalah alat tangkap yang memakai pemberat yang sampai ke dasar laut, yang mempunahkan populasi yang ada di laut, sampai batu karangpun bisa terangkat (sebagai tempat tinggalnya ikan). Ini merupakan teknik-teknik yang sangat merusak populasi yang ada dilaut.

Di sisi lain, didesa Tameran juga terdapat orang-orang dari daerah lain dengan kapal-kapal penangkap ikan komersil yang datang untuk menangkap ikan. Kapal-kapal komersil itu datang dan menangkap ikan di wilayah penangkapan tradisional, namun pemerintah tidak melakukan apa-apa untuk mendukung tuntutan tradisional yang seharusnya dilarang untuk menangkap ikan secara komersil.

Sifat keterbukaan sumberdaya perikanan tersebut berkaitan pula dengan ketidakpastian pemilikan sumberdaya. Tidak adanya keterbukaan dan ketidakpastian pemilikan sumberdaya (*property right*) merupakan sumber penyebab kehancuran sumberdaya yang pada gilirannya mempengaruhi kelangsungan praktek pengelolaan sumberdaya tersebut. Setiap orang atau kelompok masyarakat tidak memiliki hak apa-apa terhadap sumberdaya itu, kecuali kesempatan untuk memanfaatkannya saja.

Hampir seluruh sumberdaya pesisir dan laut dapat digolongkan sebagai *Common property resource* atau *common pool resource*. Ikan Terubuk yang bermigrasi dari wilayah selat Bengkalis ke wilayah lain sudah barang tentu sulit ditetapkan batas wilayah kepemilikan sumberdayanya, atau sulit melarang pihak lain untuk tidak menangkap ikan Terubuk.

Sudah diketahui secara meluas dari berbagai riset yang dilakukan di ekosistem pesisir dan lautan, bahwa kegiatan penangkapan (*effort*) yang dilakukan seorang nelayan tidak hanya mempengaruhi produktifitas tangkapan nelayan secara

perorangan, tetapi juga mempengaruhi produktifitas tangkapan seluruh nelayan di masa selanjutnya, karena perbuatan seorang nelayan berdampak pula terhadap stok ikan secara keseluruhan.

Intinya bahwa kebebasan dalam mengakses sumberdaya milik umum perlu dipertahankan sebagai sumberdaya milik bersama, hanya saja hak-haknya diatur melalui kebijakan privatisasi atau pengawasan pemerintah.

Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi kehancuran sumberdaya yang paralel dengan keberlangsungan praktek tradisional pengelolaan sumberdaya adalah pemberian hak-hak kepemilikan (*property right*) melalui aturan main, hukum atau kebijaksanaan publik dan kontrol serta pengawasan dan pengaturan terhadap sumberdaya alam tersebut.

Pola-pola pengelolaan tradisional sumberdaya laut desa Tameran perlu diidentifikasi keberadaannya sehingga dapat dikembangkan sebagai suatu institusi yang mampu membawa perbaikan kesejahteraan masyarakat nelayan. Pola-pola pengelolaan tradisional sumberdaya laut merupakan kelembagaan yang mengatur pemanfaatan sumberdaya secara bersama-sama oleh suatu komunitas masyarakat.

Dalam implementasinya, pembangunan perikanan melibatkan berbagai pihak (pemerintah, swasta, LSM, tokeh dan nelayan) yang masing-masing mempunyai fungsi dan tugas serta pada dasarnya untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pembangunan perikanan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat nelayan.

Disisi lain, kemampuan masyarakat dalam mengakses sumberdaya perikanan sangat beragam, ada yang memiliki kemampuan tinggi dan ada yang bahkan memiliki kemampuan yang sangat minimal. Ketika suatu inovasi pembangunan perikanan dikomunikasikan kepada masyarakat tidak dengan sendirinya seluruh lapisan masyarakat segera mampu memanfaatkannya.

Ada masyarakat yang dengan cepat mampu memanfaatkannya, ada yang membutuhkan waktu cukup lama dan bahkan ada masyarakat yang tidak punya kemampuan untuk memanfaatkannya jika tidak didukung oleh pihak luar (pemerintah) terutama dalam pembiayaan.

Peran pemerintah melalui berbagai kebijakannya seperti pelayanan kredit usaha nelayan,

penataan kelembagaan dan tenaga penyuluhan, telah dirasakan sebagai faktor partisipasi pemerintah dalam pembangunan perikanan di desa Tameran.

Kelembagaan merupakan gugus kesempatan bagi masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya. Dukungan kelembagaan makin dirasakan oleh nelayan terutama kelembagaan kelompok nelayan yang merupakan wadah kebersamaan mereka dalam aktifitas usaha nelayan itu. Dalam berkelompoklah mereka saling tukar menukar informasi, diskusi memecahkan persoalan yang dihadapi dan membuat perencanaan kegiatan usaha nelayan ke depan.

Keberadaan pengelolaan sumberdaya laut dapat dilihat dari 3 (tiga) bentuk: **pertama**, adalah bentuk pelarangan kegiatan penangkapan pada waktu-waktu tertentu yang didasarkan pada faktor-faktor seperti musim ikan, siklus penangkapan, kepentingan ritual. **Kedua**, adalah kegiatan tangkapan hanya pada kelompok atau individu tertentu, dan **ketiga**, adalah pemungutan semacam pajak tangkapan atau sewa yang dikenakan pada hasil tangkapan yang berlebih (Polunin, 1984, seperti yang dikutip Feliatra, Dea, 1998).

Kondisi-kondisi dan permasalahan tersebut merupakan suatu acuan bagi pembuat kebijakan untuk mencari model-model pemikiran yang sesuai dengan kondisi masyarakat pantai, yang merupakan basis dalam upaya mengembangkan pembangunan disektor kelautan dimasa-masa yang akan datang. Secara konseptual, struktur hak kepemilikan sumberdaya yang dapat menghasilkan alokasi yang efisien dalam ekonomi pasar harus mempunyai empat karakteristik penting (Titienberg, 1999, dalam Dharmawan, 2002) sebagai berikut: (1) Universalitas (*universality*), semua sumber adalah milik pribadi (*privately owned*), dan seluruh hak-haknya dirinci dengan jelas dan lengkap, (2) Eksklusifitas (*eksklusiviry*), semua manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pemilikan dan pemanfaatan sumberdaya itu harus dimiliki oleh pemilikinya saja, (3) Dapat dipindahtanggankan (*transferability*), (4) Terjamin pelaksanaannya (*enforceability*).

Kalau ke-empat komponen di atas bisa diterapkan dalam pengelolaan sumberdaya, maka alokasi sumberdaya dapat berlangsung secara efisien. Seorang pemilik sumberdaya dengan hak-

haknya yang mencakup keempat komponen diatas, mempunyai insentif yang luar biasa baginya untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki seefisien mungkin, karena kegagalan dalam mengelolanya akan merupakan resiko atau kerugian bagi dirinya sendiri.

## KESIMPULAN

Beberapa poin penting dan pokok yang telah digali dan dikaji dalam penelitian ilmiah yang berjudul "Islam Dalam Konteks Pengembangan Masyarakat Melayu Nelayan Bagian Pertama: Potret Kondisi Sosial Faktual Desa Tameran Bengkalis Riau" ini dapat disajikan dan ditampilkan menjadi kesimpulan kajian penelitian sebagai berikut: (1) Desa Tameran terletak di sebelah Timur Ibukota Kecamatan Bengkalis yang merupakan salah satu desa pantai yang potensial penghasil ikan, akan tetapi memiliki ratio beban tanggungan hidup yang cukup tinggi yaitu sekitar (42,09 %). (2) Desa Tameran Bengkalis Riau didiami oleh beragam kelompok etnik. Lima kelompok etnik utama adalah Melayu, yaitu sebesar (62,8 %), diikuti oleh kelompok etnik Jawa (20,5 %), kelompok suku Asli (10 %), kelompok etnik Cina/ Tionghoa (3,9 %) dan kelompok etnik lain-lainnya yang terdiri dari kelompok etnik Bugis, Minang dan etnik Batak, sekitar (2,8 %). (3) Sedangkan pada pembahasan tentang keberagaman kelompok agama, maka kelompok agama Islam merupakan porsi kelompok yang terbesar (85 %) dianut, kemudian diikuti kelompok agama Budha (13,9 %), Kristen (0,5 %), sedangkan sisanya beragama Konghucu atau yang memenuhi kategori lain-lain sekitar (0,8 %). (4) Melalui kajian ini pula ditemukan bahwa sumber daya manusia nelayan, umumnya hanya berpendidikan formal tingkat Sekolah Dasar dan pendidikan non-formalnya sangat terbatas. Dari data konkrit para nelayan yang diamati dalam penelitian ini, sebagian besar (63,1%) dari mereka berpendidikan formal Sekolah Dasar, (22,4%) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan (14,4%) Sekolah Lanjutan Atas. Pendidikan non formal, sebagian besar (80,7%) tidak pernah mendapatkan/ mengikuti pendidikan non formal, (11,7%) pernah mengikuti pendidikan non formal, (11,7%) pernah mengikuti pelatihan, dan (7,4%) pernah mengikuti pelatihan dan magang tentang usaha perikanan. (5) Pada umumnya penduduk desa Tameran mempunyai matapecaharian sebagai

petani (63,41 %), nelayan (16,89 %), peternak (1,44%), pengrajin (5,78%), PNS lainnya (0,7%), guru (2,89 %), pedagang (1,35 %), buruh (4,60 %) dan sebahagian kecil tukang sekitar (2,89 %). (6) Sistem upah pada usaha perikanan laut di desa Tameran ada dua macam. **Pertama**, sistem upah tetap dengan gaji harian sebesar Rp.100.000 sampai dengan Rp.200.000 per hari. Satu kali operasi penangkapan selama 12 hari, yakni pada pasang besar yang disebut **“Satu Kelam”**. Jika penghasilan melebihi Rp.35.000.000 untuk satu trip diberikan premi sebesar Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.1.500.000 per orang.

Sistem upah jenis **kedua** merupakan bagi hasil di mana pemilik kapal mendapat bagian 50 persen dari hasil penjualan bersih. Sisa hasil penjualan dibagi sama rata sesama buruh nelayan lainnya. Kerusakan kapal serta alat penangkapan ditanggung pemilik. (7) **Struktur komunitas** dan stratifikasi sosial, menunjukkan pola hubungan kental **‘patron-client’** dengan sistem pelapisan masyarakat: tokeh–buruh atau pembantu kerja nelayan. Sedangkan keorganisasian dan kelembagaan sosial berhubungan dengan berbagai kebutuhan pokok kehidupan nelayan. Untuk kebutuhan matapencaharian sebagai nelayan menimbulkan kelembagaan perikanan. Pada masyarakat Melayu nelayan desa Tameran terdapat koperasi yang memenuhi kebutuhan nelayan setempat dan hubungan nelayan dengan para tokeh atau juragannya melalui kedai atau toko.

(8) Masyarakat Melayu nelayan desa Tamerantermasuk kelompok kategori usaha kecil dengan pola penanganan usaha yang bersifat tradisional dan terbatas. Masyarakat Melayu nelayan desa Tamerandalam pengelolaan usaha perikanan mengalami ketergantungan terhadap para tokeh, kondisi ini menyebabkan akses masyarakat Melayu nelayan desa Tameranterhadap sumberdaya sangat terbatas yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan para nelayan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Ghofur, A. Dkk, 2014, *Problematika Pembangunan Pulau Terluar Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rupa Utara Kabupaten*

*Bengkalis*, Asa Riau, Cetakan Pertama, Pekanbaru.

Hidayatullah, A., Dkk, 2013, *Al Wasim: Al-Qur’an, Tajwid, Kode, Transliterasi Perkata, Terjemahan Perkata*, Cipta Bagus Segara, Jakarta, hal. 302

Thobroni, A. Y., 2005, *Laut dan Pengelolaannya Dalam Perspektif Al-Qur’an*, Desertasi, Program Pasca Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Thobroni, A. Y., 2011, *Fikih Kelautan: Perspektif Al-Qur’an Tentang Pengelolaan Potensi laut*, Dian Rakyat, Cetakan Pertama, Jakarta.

Yasin, A. 2008, *Partisipasi Perempuan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan*, dalam Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender, 2008, Vol: VII, No.2, h. 216, PSW UIN Suska Pekanbaru.

Yasin, A. 2008, *Adaptasi Sosial Keagamaan Masyarakat Lokal di Lingkungan PeDesaan Bengkalis Riau*, dalam Kutub Khanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol: 11, No.1, h.135, Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Suska Riau, Pekanbaru.

Yasin, A. 2004, *Menggalang Partisipasi Wanita Dalam Program Pengembangan Masyarakat Nelayan: Kasus Desa Meskom Bengkalis Riau*, Laporan Hasil Penelitian, LPP IAIN Susqa, Pekanbaru.

Bogdan, R. C. and Biklen, S. K., 1982, *Qualitative Research for Education: an introduction and Theory and Methodes*, Boston, Alyyn an Bacon Inc.

Budiharsono, S., 2001, *Teknis Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. CIDES, Jakarta.

Conyers, D., 1991, *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga, Suatu pengantar*, Gajah Mada University, Yogyakarta

Dams, T., 1980. *“Development from below and people’s Participation as key Principals Of Integrated Rural Developmet”* Dalam Summary Report of The International Research Seminar on the Saemaul Undong, Korea. Diedit oleh ManGap Lee. Institut of Simaul

- Undong Studies, Seoul, national University, Seoul.
- Ishaq, I., 2002, *Masalah Sosial Masyarakat*, Unri Pres, Pekanbaru, Riau.
- Majelis Malin Sutan, 2014, *Pentingnya Hidup Bermasyarakat*, dalam Ad-Da'wah: Bulletin Jum'ah, 2014, (Pentingnya Hidup Bermasyarakat), Edisi 689/IKMI/B.J/III/07 Maret 2014, IKMI Koorwil Riau, Pekanbaru.
- Siregar, M., 2014, *127 Tahun 1886-2013: Jejak Perikanan Riau (lahir Terperangkap Hutang, Matipun Meninggalkan Hutang*, Zanafa Publishing, Cetakan ke-1, Pekanbaru.
- Marjali, A, 1993, *Peasant*, Bahan Kuliah Struktur Sosial, pada Program Studi Sosiologi PeDesaan, IPB Bogor.
- Moleong, L. J., 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Mosher, A. T. 1971, *Agricultural Development. Dalam Behavioral Change in Agriculture: Concept and strategies for Influencing Transition*. Diedit oleh J. Paul Leagans dan Charles Loomis. Comel Unhei sity Press, Ithaca, New york, USA.
- Nasoetion, L. I., 1990, *Suatu Alternatif Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Melalui Integrasi Perencanaan Pembangunan yang bersifat Bottom Up dan Top Down*. Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PeDesaan, Diselenggarakan oleh GAKARI, di Bogor tanggal 11 Januari 1990.
- Shihab, M. Q., 2000, *Tafsir Al-Misbab: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Vol. 1-15, Jakarta.
- Rusli, S., Sumardjo, dan Syaikat, Y., 1995, *Metodologi Identifikasi Golongan dan Daerah Miskin*, Kerja Sama Fakultas Pertanian IPB dan PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Singarimbun, M. dan Effendi S. (Editor), 1981, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Slamet Y, 1994, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Sebelas Maret University Press Surakarta
- Spradley, J. S., 1990, *Participan Observation*, Holt, Reneland ang Winston, New York
- Johan, S. M. 1996, *Agama dan Masalah Kemiskinan serta Budaya Kerja Masyarakat Maritim Kepulauan Riau*, Laporan Hasil Penelitian, Balai Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat IAIN Suska Pekanbaru, hal.111.
- Suharjo, AJ, 1986, *Pentingnya Hidup Bermasyarakat*, Materi pembekalan KKN, diedit Margono Slamet Universitas Lampung, Lampung.
- Wolf, E., 1982, *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*, Rajawali, Jakarta.